

Pengaruh Implementasi Program Kerja terhadap Perolehan Suara PKS Pada PEMILU 2004 di Kota Ambon

Oleh
JOHAN TEHUAYO¹

Abstraksi

Pemilu tahun 2004 merupakan momentum yang sangat menggembirakan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), karena memperoleh dukungan suara yang signifikan dari basis pemilih Islam di Indonesia. Pada konteks lokal PKS dapat meningkatkan perolehan suaranya hingga mencapai satu fraksi utuh di DPRD kota Ambon. Keberhasilan PKS sebagai sebuah partai politik yang berideologi Islam pada pemilu 2004 ini, karena mengimplementasikan program-programnya secara efektif. Pengaruh implementasi program kerja, PKS menjadi salah satu kekuatan politik yang dominan mewakili pemilih Islam di Parlemen kota Ambon.
Kata kunci: Program Kerja, PKS Pemilu 2004

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perubahan paradigma sistem kepartaian dari sistem tri partai menjadi sistem multi partai telah menghadirkan sejumlah kekuatan-kekuatan politik formal atau partai politik dalam panggung politik lokal maupun nasional di Indonesia. Kehadiran partai-partai politik yang berasaskan Islam menunjukkan bahwa basis politik pemilih Islam memiliki loyalitas yang sangat kuat terhadap partai Islam. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Pelaksanaan Pemilihan Umum di era reformasi dengan sistem multi partai telah menjustifikasikan bahwa partai-partai politik yang berasaskan Islam masih diterima di kalangan pemilih tradisional. Hasil perhitungan suara secara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilihan umum tahun 2004 telah menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh dukungan suara yang signifikan.

Meningkatnya perolehan suara PKS pada pemilu 2004 merupakan sebuah keberhasilan yang dicapai selama masa reformasi, bila dibandingkan dengan pemilu tahun 1999. Kecenderungan meningkatnya dukungan publik kepada PKS turut berpengaruh terhadap dinamika politik nasional maupun lokal. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sikap politik masyarakat yang selama masa Orde Baru memberi dukungan politiknya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami perubahan dan memilih PKS, sebagai salah satu partai politik yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan para pemilih Islam.

¹ Johan Tehuayo – Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura, Ambon

Beberapa factor yang menyebabkan meningkatnya peroleh suara PKS adalah pertama : terjadinya konflik internal dikalangan elit PPP yang berimplikasi terhadap perpecahan dalam infrstruktur partai maupun basis politik Islam. Kedua, system dan mekanisme rekritmen politik, baik yang terkait dengan pengurus partai maupun rekrutmen calon anggota legislatif didominasi oleh aktivis kampus dan para pemimpin informal di dalam masyarakat.

Ketiga, kemampuan infrastruktur partai dalam memperjuangkan berbagai aspirasi dan kepentingan umat dengan perumusan dan implemmentasi program-program kerja yang efektif, dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat misalnya program di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah reputasi gemilang yang di raih partai ini karena dengan memperoleh dukungan suara 4 kursi di DPRD Kota Ambon dan berhasil membentuk satu fraksi. Sedangkan PPP memperoleh 2 kursi, dan PBB memperoleh 2 kursi di DPRD kota Ambon

2. Permasalahan

Dengan melihat pada latar belakang masalah yang di kemukakan di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan makalah ini adalah Apakah implementasi program kerja PKS dalam dapat mendongkrak perolehan suara pada pemilu 2004 di kota Ambon?

3. Perspektif Teoritis

Keberadaan partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bias menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran yang serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bias di konsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bias lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah : suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo,2010:403-404).

Sedangkan menurut Friedrich dalam (Budiardjo,2010:404) partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material.

Terkait dengan partai politik, menurut Jemly Asshiddiqie, partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan banyak yang berpendapat partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Karena itu partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap system politik yang demokrasi. Namun demikian banyak juga yang berpandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius diantaranya adalah menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu berahi kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah

berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang muda dikelabui, untuk memasakan berlakunya kebijakan-kebijakan public tertentu (Rousseau,1762) atau kepentingan umum (Perot,1992)..

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga Negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan "checks and balances". Akan tetapi jika lembaga-lembaga Negara dalam hubungannya wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Oleh karena itu, system kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya system ketatanegaraan. Namun dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol. Disamping factor-faktor lain seperti pers yang bebas dan peranan kelas menengah yang tercerahkan, dan sebagainya, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (values and interests) dari konstituen untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.

Pada konteks yang lain, partai politik menurut La Palombara dan Weiner,(1966) dalam Firmansah,(2005:67-68) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik adalah sebagai berikut :

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpinnya yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada system dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi., dan mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur Organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat local sampai nasional, dan pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosudural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah keatas maupun dari atas kebawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi control dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level local maupun nasional.

4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Eksistensi partai politik di tengah-tengah masyarakat sangat tergantung dari kemampuan partai dalam melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif. Beberapa fungsi partai politik menurut Meriam Budiarjo (2010:405-409) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana komunikasi politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak terbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat lain yang senada. Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dapat dikurangi. Selain itu partai politik memasukkannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah. Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang orang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, hak dan kewajiban.

Dimensi lain sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (political culture) suatu bangsa

Sosialisasi politik menurut M. Rush (1992) dalam Meriam (2010:407) adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

3. Sarana Rekritmen politik.

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai membutuhkan kader-kader yang memiliki kualitas, hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembnagkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan peminannya sendiri dan mempunyai peluang untuk menggerakkan calon-calonnya untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain itu partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotannya. Maka ia pun berusaha meraih sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi masa (sebagai onderbow) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi di perluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat hitrogen apakah itu dari segi etnis(suku bangsa), social ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik apabila keanekaragaman itu terjadi di Negara yang menganut paham demokrasi persaingan dan perbedaan pendapat di anggap hal yang wajar dan mendapatkan tempat. Akan tetapi di dalam Negara yang hitrogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengandung potensi konflik.

Pada konteks yang demikian peran partai politik dengan mudah membantu dan mengatsinya atau sekurang-kurangnya di atur sedemikian rupa sehingga akaibat negatifnta dapat dihindari. Elit partai dapat berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai potensi konflik yang berkembng di masyarakat. Menurut Arend (1968) dalam Meriam (2010:409) perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat masa bawah dapat di atasi oleh kerja sama di antara elit-elit politik. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahannya. Menurut Yves dan Andrew dalam Jimly,(2005:59) fungsi paerai politik itu mencakup fungsi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap prilaku memilih (voting patterns), sarana recruitment politik, dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Selain peranan partai politik sebagai salah satu pilar pembangunan demkrasi, Menurut Jimly,(2005:63) organisasi itu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya ialah bahwa organiassi partai cenderung bersifat oligarkis. Partai politik kadang-kadang bertindak lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Oleh karena itu untuk mengatsi potensi buruk partai politik seperti di kemukakan di atas, di perlukan beberapa

mekanisme penunjang.pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme keterbukaan partai melalui mana warga masyarakat diluar partai dapat diikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut Samego, dalam (Rahman:2007:147) disebut juga dengan "political Market" atau pasar politik adalah tempat individu atau masyarakat berinteraksi melakukan kontrak social (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik), dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih, setelah lebih dahulu melakukan serangkaian aktifitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televise), serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face to face (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Dalam perkembangan teori dan praktik politik modern, kontrak sosial kemudian diterjemahkan dalam berbagai bentuk dalam pemilihan umum. Sehingga pada dasarnya pemilu adalah sebuah kontrak sosial antara pemilih dan kandidat tentang berbagai hal yang akan dijamin oleh pemilih pada para kandidat bila mereka terpilih. Para kandidat terpilih ini kemudian akan mengelola sebuah struktur kekuasaan tertentu serta memproduksi berbagai keputusan politik. Keputusan-keputusan politik tersebut akan berimplikasi secara langsung pada masyarakat pemilih, baik berupa implikasi positif maupun negatif (Hobbes, dalam Asfar, 2005:27).

Dalam teori konvensional (Schumpeterian) Sutoru Eko (2006:10-11), menegaskan bahwa pemilihan umum akan lebih bermakna bila ditopang oleh sistem kepartaian pluralis yang menghasilkan pertarungan politik yang kompetitif, terbuka dan adil. Teori ini samasekali tidak relevan di Indonesia. Memang situasi yang digambarkan Schumpeter sangat di butuhkan dalam konteks pemeliharaan sistem yang sudah demokratis (poliarhi), yakni mendorong kompetisi, liberalisasi dan partisipasi akan tetapi itu saja tidak cukup mendorong transisi menuju demokrasi. Di Indonesia, Pemilu 1999 dan 2004 yang telah berlangsung secara kompetitif, liberal, dan partisipatif tidak berhasil membawa bangsa ini keluar dari masa transisi.

Sejalan dengan teori di atas, dalam teori kepartaian dan pemilu konvensional juga menegaskan bahwa pemilihan umum yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai. Dengan kalimat lain, individu memilih partai bukan karena kehendak orang lain (mobilisasi, paksaan, atau ancaman), melainkan kehendak sendiri. Gambaran tentang pemilih rasional-otonom ini merupakan kebalikan dari masa mengambang di masa Orde Baru yang sangat rentang

dengan mobilisasi; namun sekedar kehadiran pemilih rasional otonom tidak cukup untuk mendorong perubahan politik.

Terkait dengan kampanye, menurut Firmansyah (2007:268) kampanye politik selama ini hanya dilihat sebagai suatu proses interkai intensif dari partai politik kepada publik dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilihan umum. Dalam definisi ini kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia pemilu kepada suatu kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Liker&Negrine,2000), dalam Firmansyah,(2007:268)

Prilaku pemilih dikategorikan kedalam dua kubu yakni mazhab Colombia dan Mazhab Michigan. Pertama, mazhab Colombia lebih menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam pemilu. Sedangkan kedua lebih menekankan pada faktor psikologis dari pemilih.(Suwondo,1997:5) dalam Irtanto,2008:171-172).Model sosiologis melihat bahwa masyarakat sebagai suatu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga teratas. Kelompok-kelompok yang berbeda tersebut membentuk persepsi, sikap, keyakinan dan sikap politik dari masing-masing individu. Sedangkan model sosio-psikologis dari mazhab Michigan, masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilihan umum lebih banyak di pengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang di dalam dirinya, yang semua itu merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi politik. Suatu ikatan yang bersifat psikologi antara individu dengan suatu partai politik. Menurut Campbell dalam (Irtanto,2007:172) identifikasi kepartai merupakan faktor yang dapat menjelaskan pola perilaku pemilih serta merupakan fakta yang sentral dalam memperhitungkan sikap dan perilaku pemilih.

Program Politik dan Opini Publik

Menurut Firmansyah,2008:71-72), secara eksternal, kepada public yang lebih luas, partai politik memiliki peran sebagai organisasi yang terus menerus melahirkan program politik. Program politik dalam hal ini didefinisikan sebagai semua program yang terkait dengan semua agenda kerja partai, terkait dengan isu-isu nasional maupun local dan terkait baik langsung maupun tidak langsung konstalasi persaingan dalam mempengaruhi pengaruh dan perhatian public. Program politik tidak hanya diproduksi dan dikomunikasikan menjelang pemilu. Sebagai layaknya organisasi politik, partai politik perlu secara terus menerus mengawal setiap perubahan dan perkembangan yang terdapat dalam setiap masyarakat. Partai politik memiliki tanggungjawab untuk terus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Sekaligus menegembangkan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Program politik ini perlu di komunikasikan kepada public, yang membedakan antara satu partai dengan partai lainnya adalah ideologi yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun program politik. Masing-masing partai politik memiliki system politik yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga program politik yang dikomunikasikan kepada public, akan tercipta opini public mengenai suatu permasalahan pertimbangan publik social. Public tidak berada dalam kapasitas untuk untuk mampu menilai apa yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab partai politik untuk mengarahkan

perhatian dan pertimbangan publik akan suatu kejadian tertentu. Opini publik dalam hal ini dilihat sebagai suatu makna dan pemahaman yang berkembang serta ada dalam benak kolektif masyarakat atau suatu kejadian dan peristiwa. Pembentukan opini publik tidak hanya berguna bagi partai politik, tetapi juga akan sangat membantu masyarakat yang awam atas suatu kejadian dan peristiwa.

Terkait dengan peranan media publik, menurut Firmansyah (2005:28-32), bahwa dunia politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk pikuk berpolitik. Media dalam hal ini diartikan secara luas yaitu segala sarana yang ampaiakan terkait dengan penyampaian pesan, baik yang bersifat riil maupun simbolik, dari institusi politik kepada masyarakat yang lebih luas. Media dalam hal dapat berupa TV, radio, majalah, dan Koran. Digunakannya media masa sebagai instrument untuk mengkomunikasikan ide, pesan, dan program kerja politik adalah karena kenyataan bahwa media dapat di pakai untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas.

Lebih lanjut dikatakan, dengan kemampuan untuk menjangkau massa dalam jumlah yang cukup besar, informasi dari media masa akan dapat menembus populasi yang besar pula. Sementara itu penelitian dalam komunikasi, psikologi dan sosiologi menyatakan bahwa cara pandang manusia akan sangat ditentukan oleh jenis dan volume informasi yang mereka terima. Implisit dari penelitian-penelitian ini adalah bahwa kita dapat membentuk opini publik melalui informasi yang kita berikan. Ketika kekuatan politik ingin mendiskreditkan image politik lawan, yang perlu dilakukan sudah cukup dengan membajiri informasi di media masa dengan hal-hal buruk yang dilakukan lawan politik. Begitu juga sebaliknya, ketika ingin membentuk image positif dari publik, cukup dengan membajiri media masa dengan hal-hal positif dari suatu partai atau kandidat.

B. Pembahasan

Parat Keadilan Sejahtera (PKS) dapat meningkatkan perolehan suaranya pada pemilu 2004 di Kota Ambon sangat di pengaruhi oleh struktur partai dan peran elit dalam mengimplementasikan berbagai program-program kerja partai kepada masyarakat.

Perolehan suara PKS yang diraih pada pemilu 2004 juga di sebabkan karena perilaku politik para kader PKS yang menunjukkan sikap elegan. Kampanye yang mereka lakukan pun mendapat simpati dari masyarakat luas karena disuguhkan dalam formal yang menarik, tanpa konflik dan kekerasan, selain itu komitmen dan solidnya kaders PKS mulai dari struktur tingkat Pusat sampai dengan struktur tingkat Ranting tanpa ada perpecahan di antara eltnya. Inilah yang menundang simpati masyarakat, terutama kelas menengah atas selama menjelang pemilu 2004 tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun organisasi Islam tertentu.

Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap perolehan suara PKS adalah implementasi program-program PKS di berbagai aspek kehidupan masyarakat secara efektif. Terutama di bidang politik, ekonomi, social budaya, hukum, pendidikan, dan kesehatan. Terkait dengan program di bidang ekonomi misalnya, beberapa rmusan program PKS yang tertuang dalam platform partai adalah :

1. Mengembangkan system ekonomi moral sebagai dasar pertimbangan, etik, konsepsional, dan operasional dalam setiap aktifitas ekonomi.

2. Mengembangkan kebijakan afirmatif dalam ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil agar tercapai persamaan dalam mendapat peluang seluruh pihak.
3. Menegakan hak buruh dan menempatkannya sebagai asset nasional mitra usaha
4. Menggerakkan sector pertanian, agro bisnis, dan agro industry dalam rangka mencapai swasembada pangan. (Litbang Kompas, 2004:3007).

Sedangkan terkait dengan rumusan program di bidang pendidikan adalah :

1. Memperkokoh penyelenggaraan wajib belajar melalui mobilisasi fasilitas fisik, serta meningkatkan mutu pendidikan di kalangan masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalitas, integritas dan dalam rangka mengembalikan peran Guru sebagai unsur kunci dalam pembangunan bangsa.
3. Meningkatkan anggaran pendidikan hingga mencapai taraf yang seimbang dengan kebutuhan pemecahan problema sumber daya manusia dalam pembangunan Indonesia masa depan. (Endin, 2004:307).

Berbagai rumusan program PKS pada tingkat atas maupun bawah telah tersosialisasikan dan terimplementasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari berbagai program tersebut. Hal ini berbeda dengan partai politik yang berideologi Islam lainnya. Secara struktural memiliki berbagai program partai, namun proses sosialisasi dan implementasinya belum maksimal dilakukan kepada masyarakat. Realitas politik ini terlihat pada hasil pemilu 2004 di mana partai-partai Islam selain PKS memperoleh dukungan yang rendah.

Proses merealisasikan berbagai program partai di tengah-tengah masyarakat terutama dalam mendorong dan mempengaruhi partisipasi publik dalam proses-proses perumusan kebijakan pembangunan, maupun dalam pelaksanaannya, menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat misalnya peranan partai politik dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat justru sangat berpengaruh terhadap sikap politik individu maupun kelompok dalam memilih calon-calon anggota legislatif yang dikompetisikan oleh para kontestan pemilu.

Masyarakat pemilih di kota Ambon menghadapi pemilihan umum 2004 di perhadapkan dengan berbagai problem sosial, politik ekonomi, dan budaya, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini diakibatkan oleh konflik sosial yang terjadi di kota Ambon. Realitas konflik sosial yang terjadi di kota Ambon disebabkan oleh pertikaian atau perkelahian antar individu yang meluas sampai pada konflik antar kelompok, maupun antar komunitas. Dampak negative yang ditimbulkan oleh konflik sosial yang alami oleh masyarakat lokal di antaranya adalah : pertama, proses penyelesaian potensi-potensi konflik yang selalu muncul dalam masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok, kedua, adanya segregasi sosial dalam proses-proses interaksi sosial maupun dalam penataan pemukiman penduduk di kota Ambon, ketiga, meningkatnya jumlah kelompok masyarakat di tempat-tempat pengungsian serta rendahnya kondisi kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya.

Dari berbagai problem yang di alami oleh masyarakat tentunya memerlukan penngagan yang serius dari berbagai kalangan atau elemn bangsa, baik oleh pemerintah, pihak swasta, peran partai-partai politik, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, baik pada tingkat local, nasional, maupun internasional.

Realitas politik ekonomi, dan social budaya yang di alami oleh basis politik di kota Ambon ini, memberikan peluang kepada partai-partai politik untuk meraih dukungan suara pada pemilu 2004. Kehadiran PKS dengan meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan berbagai program kerjanya di tengah-tengah masyarakat terutama pimilih Islam, telah terlaksana seraca efektif. Hal ini terlihat pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan di tempat-tempat pengungsian. Di antaranya adalah proses pendidikan politik kepada para pemilih pemula, kegiatan ini bertujuan untuk memberuikan pencerahan atau pemahaman kepada masyarakat terkait dengan berbagai fenomena politik yang berkembang menjelang pemilu 2004, kegiatan ini di arahkan pada kalangan generasi muda di tempat-tempat pengungsian. Pada kondisi yang demikian proses doktrisasi idiologi dan platform secara intensif dilakukan kepada basis pemilih Islam.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh para kader PKS kepada masyarakat, di antaranya adalah pemberian bantuan kemanusiaan kepada kelompok masyarakat pengungsi, perlengkapan pendidikan pengobatan grtais, pembaerdayaan ekonomi kepada kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah dan lan sebagainya.(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, sabtu,23/7/2006, dalam Tehuayo,2007:97).

Implementasi program kerja PKS ini juga terlihat secara baik, ketika mereka memberikan berbagai bantuan social kepada basis-basis politik di daerah-daerah yang mendapat imbas konflik sosisl. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa PKS merupakan partai politik yang dapat menunjang kehidupan mereka. Oleh karena itu maka dapat di katakana bahwa kemengan PKS pada pemilu 2004 adalah karena pemberian bantuan soaiial yang diberikan kepada masyarakat (hasil wawancara dengan salah Tokoh masyarakat dalam (Hidayat,2006,103).

Meningkatnya perolehan suara PKS pada pemilu 2004 juga di benarkan oleh Ketua DPD PKS Kota Ambon, bahwa : sikap masyarakat dalam memberikan dukungan suara kapada PKS karena keterlibatannya dalam proses-proses penyelsaian konflik social, maupun keterlibatan mereka secara aktif dalam memberikan berbagai bantuan social kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat pengunisn. (Hidayat,2007:2005).

Selain keberhasilan struktur dan elit PKS dalam mengimplemnatsikan berbagai programnya, keberhasilannya dalam menggunakan media public dalam mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan berbagai kegiatan-kegiatannya kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk pembentukan opinan public menjelang pemilu 2004.Pembnetukan opini public turut berpengaruh terhadap sikap politik masyarakat dalam memilih para calon anggota legeslatif yang berkompetsisi untuk memperoleh kekuasaan pada lembaga legeslatif di tingkat local.

Peran elit PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam menjelang pemilu 2004 baik di parlemen maupun di luar parlemen dan aktif menggunakan media public memunculkan persepsi dan penilaian yang positif terhadap elit-elit PKS. Hal ini dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa mereka lebih memilih PKS pada pemilu 2004 karena sering tampil pada media cetak maupun elektronik. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Nusaniwe, (23/7/2006, dalam Tehuayo, 2007:97).

Selain keterlibatan PKS dalam proses-proses penyelesaian konflik social di kota Ambon, keterlibatan aktif partai ini juga terlihat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para elit-leit partai, dengan memberikan ceramah-ceramah keagamaan di masjid-masjid maupun tempat-tempat pengungsian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja struktur dan elit PKS dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan berbagai program kerjanya kepada masyarakat terutama kepada basis pemilih Islam di kota Ambon, sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam memilih anggota legislatif pada pemilu 2004. Realitas politik inilah yang menyebabkan PKS memperoleh dukungan suara yang signifikan sehingga berhasil membentuk satu fraksi di DPRD kota Ambon.

C. Kesimpulan

Dengan melihat pada hasil pembahasan masalah yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Keberhasilan PKS dalam memperoleh dukungan suara yang signifikan pada pemilu 2004, yaitu memperoleh 4 kursi atau satu fraksi di DPRD kota Ambon, karena dipengaruhi oleh kemampuan struktur dan elit partai dalam mengimplementasikan program-program kerjanya kepada masyarakat terutama pada basis politik Islam.
2. Proses sosialisasi program kerja secara baik dengan menggunakan media public secara efektif baik cetak maupun elektronik dalam rangka pembentukan opini public turut mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.
3. Pengelolaan struktur jaringan baik secara vertikal maupun secara horizontal, dan peran elit partai yang maksimal terkait dengan realisasi program-program partai, kepada masyarakat turut berpengaruh terhadap sikap politik masyarakat dalam memilih anggota legislatif pada pemilu 2004 di kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Endin Aj. Soefihara, *Merebut Nurani Rakyat, Koalisi, Konflik dan Etika Politik, Sebuah Analisis Mutakhir tentang Praksis Politik di Indonesia*, Penerbit, Mizan Publika, 2005, Jakarta.
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik. Komunikasi dan Positioning Ideologi politik di Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, 2008 Jakarta.
- _____, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*, Obor Indonesia, 2007 Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, 2005 Jakarta.
- Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, Penerbit Buku Kompas, 2005 Jakarta.
- Irtanto, *Dinamika Politik Lokal, Era Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, 2008, Yogyakarta.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta.
- Muhammad Asfar, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Studi dan Artikulasi Politik Nahdiiyin, dan Dinamika Politik Dalam Pilkada Langsung, di Kabupaten Gresik Jawa Timur*, Averroes Press, 2005 Malang.
- Prajarta Dirdjosanjata & Nico L Kana, *Demokrasi dan Potret Lokal pemilu 2004*, Pustaka pelajar, 2004 Jogjakarta.
- Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, 2007, Jogjakarta.
- Johan Tehuayo, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penurunan Perolehan Suara PPP Pada Pemilu 2004 di Kota Ambon*, Tesis S2 PLOD UGM, 2007, Jogjakarta.
- Syraif Hidayat, *Partai Keadilan Sejahtera Dalam pemilu 2004*, Tesis S2, PLOD UGM 2006, Jogjakarta.